

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM (*YUDICIAL LEABILITY*) YANG  
MEMUAT KETERANGAN SAKSI TANPA PEMERIKSAAN DI HADAPAN  
PERSIDANGAN  
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 245/PID.B/2016/PN.MLG)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**SUMARDHAN**

**NIM : 201610380211012**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
OKTOBER 2018**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM (*JUDICIAL LEABILITY*) YANG  
MEMUAT KETERANGAN SAKSI TANPA PEMERIKSAAN DI HADAPAN  
PERSIDANGAN**

**(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 245/PID.B/2016/PN.MLG)**

**SUMARDHAN  
201610380211012**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Kamis / 25 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Mokh. Najih, SH., M.H., Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Akhsanul Kham, Ph.D

Mokh. Najih, SH., M.H., Ph.D

# TESIS

**SUMARDHAN**  
**201610380211012**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu / **20 Oktober 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua / Penguji : Mokh. Najih, Ph.D**  
**Sekretaris / Penguji : Dr. Tongat**  
**Penguji : Dr. Sidik Sunaryo**  
**Penguji : Dr. Haris Tofly**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **SUMARDHAN**

NIM : **201610380211012**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM (JUDICIAL LEABILITY) YANG MEMUAT KETERANGAN SAKSI TANPA PEMERIKSAAN DI HADAPAN PERSIDANGAN** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Oktober 2018  
Yang menyatakan,



**SUMARDHAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas karunia dan pertolongannyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: ***”IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUAT KETERANGAN SAKSI TANPA PEMERIKSAAN DI HADAPAN PERSIDANGAN ”*** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang ilmu hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Secara jujur penulis sampaikan disini, bahwa walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari ilmiah baik dalam pengungkapan bahasa dan penyajian secara keseluruhan. Terlepas dari itu semua maka harapan penulis mudah-mudahan apa yang penulis sajikan dalam karya tulis ini baik berupa isi, saran-saran maupun kesimpulan dari hasil yang penulis lakukan dapat merupakan sumbangan untuk menambah perbendaharaan bacaan walaupun kecil artinya.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini tampak bimbingan, pengarahan dan bantuan dari segenap pihak, maka penulis yakin bahwa karya tulis ini tidak akan dapat tersusun seperti yang apa penulis harapkan untuk itu adalah tidak berlebihan bilamana pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan serta rasa hormat kepada:

1. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Mokh. Najih, S.H.M.H., P.hd., sebagai Dosen Pembimbing I pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;

3. Bapak DR. Tongat, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing II pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Juga terima kasih kepada semua pihak baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang penulis anngap mempuyai peranan sehingga terselesainya karya tulis ini.

Akhirnya besar harapan penulis semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri yang dapat penulis jadikan bekal dalam mengabdikan diri ditengah masyarakat.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Negara. Amin Yarrobal Alamin.

Malang,.....

Sepetmber

2018.

Penulis



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Latar Belakang Permasalahan .....	1
Tujuan Dan Manfaat Penelitian	
Tujuan .....	3
Manfaat Teoritis .....	3
Metodologi Penelitian	
Jenis Penelitian.....	3
Sumber Data .....	4
Pendekatan Penelitian .....	4
Analisis Data .....	4
Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
Kedudukan saksi terhadap sebuah putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/ PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang .....	6
Kedudukan saksi terhadap sebuah putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/ PN. Malang sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi.....	8
Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan	
Pemeriksaan Saksi Dalam Tahap Persidangan .....	11

Implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sah nya sebuah putusan Hakim No. 245/ Pid.B/ 2016/ PN. Malang. ....	17
--	----

**Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang ditinjau dari Teori Keadilan.**

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang dalam aspek kesetaraan dan keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana .....	18
--	----

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang dalam aspek peraturan yang berlaku terhadap Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana.....	19
--	----

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang di tinjau dari Pembuktian Hakim di Persidangan .....	27
---	----

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang di tinjau dari Pertimbangan Putusan.....	28
---	----

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang di tinjau dari Proses Penemuan Hukum .....	30
---	----

**Kesimpulan**

Kedudukan saksi dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang di Pengadilan Negeri Malang.....	33
--	----

Implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sah nya sebuah putusan dalam perkara pidana No.245/ Pid.B/2016/PN.Mlg.....	34
---	----



Saran.....	36
Daftar Pustaka .....	38
Lampiran	



## ABSTRAK

Implikasi putusan dari saksi yang tidak hadir dalam persidangan adalah putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang, bisa dikatakan cacat formil, sebab sesuai dengan Pasal 161 (1) KUHAP dan pasal 185 (7) KUHAP bahwa seorang saksi harus dihadirkan dan disumpah saat pemeriksaan dipersidangan, sehingga saksi yang hadir dan disumpah tersebut bisa menguatkan keyakinan hakim terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) yang dilakukan oleh Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dan dapat juga bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi tadi memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya dan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Saksi yang tidak bisa hadir dan tidak disumpah dipersidangan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan, karena hanya sebagai keterangan saja bukan menjadi sebuah alat bukti terhadap tindak pidana.. Di samping itu juga putusan hakim cacat formil, putusan hakim disini adalah mahkota hakim, maksudnya bahwa keberadaan putusan Hakim dalam perkara pidana No.245/ Pid.B/2016/PN.Mlg akan memberikan konsekuensi terhadap seorang hakim itu sendiri maupun institusi dimana hakim itu bernaung, karena setiap putusan yang diambil tersebut memberikan implikasi baik atau buruk terhadap hakim itu sendiri maupun institusi Pengadilan tersebut. Jadi alangkah ideal dan menjadi sebuah kebaikan dalam putusan hakim ini apabila dalam putusan hakim tidak terjadi kesalahan, kekeliruan dan kealpaan seorang hakim, karena kejujuran, kecermatan dan ketepatan dalam mengkonstair, mengkualifisir, dan mengkonstituir permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan memberikan kondisi kepuasan terhadap semua pihak, karena hakim adalah batas terakhir keadilan yang seharusnya didapat oleh semua orang yang menginginkan keadilan.

**Kata Kunci: Hakim, Saksi, Putusan**

## **ABSTRACT**

*The implications of the decision were not present witnesses in the trial was the verdict given by the judge to the defendant in the decision No. 245 / Pid.B / 2016 / PN Malang, to say the formal defect, because in accordance with Article 161 (1) Criminal Procedure Code and section 185 (7) criminal Procedure Code that seoranag witnesses should be presented and sworn in during the examination in court, so that witnesses are present and sworn that can strengthen the judge's conviction of the offenses of fraud (article 378 of the criminal Code) conducted by TimotiusTonnyHendrawan alias Toni Hendrawan Cape alias Apeng and may also be worth And shall be used in addition to other valid evidence as long as the testimony of the witness has any correspondence with other valid evidence and has met the minimum limit of proof. Witnesses who are unable to attend and not be sworn in court can not be used as evidence in court, because only as a description is not a means of evidence against a crime. In addition, the judgment of a formal disability judge, the judge's verdict here is the crown of a judge, meaning that the existence of a judge's verdict No.245 / Pid.B / 2016 / PN Malang will have consequences on a judge himself or an institution in which the judge takes shelter, The judgment has implications for both the judge and the judge. So it would be ideal and be a good judgment in this judgment if in the judge's verdict there is no mistake, mistake and omission of a judge, because honesty, accuracy and accuracy in mengkonstair, mengkualifisir, and mengkontituir criminal problems committed by the defendant will provide conditions satisfaction against All parties, because the judge is the last border of justice that should be obtained by all who want justice.*

**Key Words: Witness, Judge's, Decision**

## Latar Belakang Permasalahan

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat<sup>1</sup>. Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi.

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan

---

<sup>1</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017

dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (*Merekayasa*) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu<sup>2</sup>

Begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TIMOTIUS TONNY HENDRAWAN Als TONI HENDRAWAN TANJUNG Als APENG, sebagaimana putusan Hakim No. 245/Pid.B/2016/PN.Mlg, Tanggal 15 Juni 2016, yang didalam putusan tersebut terdapat poin-poin putusan yang dilanggar oleh Hakim, bahwa dalam persidangan saksi PRASETYO T. WIROHARJO sebagai pemilik rumah tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut umum padahal saksi ini adalah saksi kunci yang mengetahui/mengalami tentang ada tidaknya hubungan hukum antara saksi pelapor CHANDRA HERMANTO sebagai pembeli dengan PRASETYO T. WIROHARJO sebagai pemilik rumah (penjual), kalau saksi ini tidak dihadirkan dalam persidangan maka darimana kita dapat menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

### **Permasalahan**

1. Bagaimanakah kedudukan saksi terhadap sebuah putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sahnya sebuah putusan No. 245/ Pid.B/ 2016/ PN. Mlg?

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hal.50-51.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat.

### **Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, hukum Pidana dan Perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **Metodelogi Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normative adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>3</sup> dengan dihubungkan terhadap penulisan hukum tentang putusan hakim perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, merupakan Penelitian hukum normatif yang penulis pilih.

---

<sup>3</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.14

## **Sumber Data**

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada inventarisasi studi pustaka, dimana melakukannya dengan menghimpun data-data lainnya yaitu:

1. Data hukum primer, yakni data hukum yang mempunyai arti prioritas maupun utama digunakan penulis untuk menyusun penulisan<sup>4</sup>. Data hukum primer merupakan sebuah bahan yang terdiri dari aturan-aturan hukum dan peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan pokok Kehakiman, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial maupun putusan Pengadilan Negeri Malang No.245/ Pid.B/2016/PN.Mlg
2. Data hukum sekunder, yakni seperti majalah, jurnal-jurnal ilmiah dan buku yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini serta dapat menjadi pedoman dan ide bagi penulis untuk menyusun penulisan<sup>5</sup>
3. Data hukum tertier, yakni memberi penjelasan atau petunjuk antara data hukum primer dan data hukum sekunder<sup>6</sup> kamus hukum, kamus umum, dan kesesuaian data-data di luar hukum yang baik dan mampu menjadi pelengkap dari hasil observasi ini.

## **Pendekatan Penelitian**

Cara mengumpulkan data yang dipergunakan teknik observasi:

1. Pendekatan Peraturan-peraturan (*Statute Approach*).

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 144.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.155.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.



Pendekatan ini adalah sebuah kajian tentang sebuah aturan yang berlaku yang dihubungkan dengan konsep bahan penelitian. Sarana yang dipergunakan dalam mengumpulkan bahan adalah studi dokumen<sup>7</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini penulis melakukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum, dimana di dalamnya terdapat pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin<sup>8</sup>. Dengan adanya konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigo.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dimana dalam pendekatan ini lebih melakukan proses telaah terhadap kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>9</sup>.

## **Analisis Data**

Bahan yang dikumpulkan dan ditata secara sistematis ini kemudian dipola dalam urutan tertentu sehingga penulis dapat menemukan dan merumuskan hal-hal yang terkorelasi atau berhubungan satu dengan yang lain dengan pokok penulisan ilmiah. Semua bahan dirangkum secara kualitatif, yaitu menafsirkan dalam kualitas yakni pandangan orang yang berkompeten dalam bidang hukum, kemudian menguraikan secara detail dan menyeluruh tentang bidang yang terkait

---

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal. 241

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal.138

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hal. 119.

dengan pokok bahasan<sup>10</sup> penulisan ini, serta mencari kesimpulan dengan menggunakan pendekatan *deduktif-induktif*.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Kedudukan saksi terhadap sebuah putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/ PN.**

**Mlg di Pengadilan Negeri Malang.**

**Saksi-saksi yang ada dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Mlg**

Sebagaimana putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg bahwa saksi-saksi yang ada di dalam putusannya adalah:

1. Chandra Hermanto (Korban)/ *A Charge*
2. Fransiscus Gionata Mahdi (Karyawan Bank CIMB Niaga tbk Malang)/ *A Charge*
3. Henru Purnomo, SH.,MH (Kuasa Hukum dari Prasetyo T.Wirohardjo)/ *A Charge*
4. Lisa Santoso (Adik terdakwa)/ *A Charge*
5. Prasetyo T.Wirohardjo (Pemilik Rumah)/ *A Charge*
6. Irma Sagita (Istri Terdakwa)/ *A de Charge*

Semua saksi hadir dalam persidangan kecuali saksi **Prasetyo T.Wirohardjo**, tidak dihadirkan dalam persidangan tetapi masuk dalam pertimbangan putusan hakim.

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi. Adapun yang dimaksud sebagai saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna

---

<sup>10</sup>Ronny Hamitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 93.

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu<sup>11</sup>. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya<sup>12</sup>

Dari batasan UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapatlah ditarik 3 (tiga) kesimpulan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- b. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan KUHAP ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apabila mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari

---

<sup>11</sup>Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Op.,Cit.*, Pasal 1 angka 26

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 17 KUHAP

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Op.,Cit.*, hal.38.

pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

### **Kedudukan saksi dalam putusan Hakim No. 245/Pid.B/2016/PN. Malang sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi**

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) hakim selain keterangan saksi yang harus dibuktikan oleh seorang saksi dalam persidangan<sup>14</sup>, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat agar keterangan saksi itu sah dan menjadi sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng yaitu,

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah:

- a. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji.

Keterangan saksi sesuai Pasal 160 ayat (3, 4) KUHP:

- 1) Dilakukan menurut agamanya masing-masing;
- 2) Lafal sumpah atau janji, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak bukan daripada yang sebenarnya;
- 3) Sumpah wajib diucapkan oleh saksi “sebelum akan memberikan” kesaksian;

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 286-290.

- 4) Karena suatu hal yang diizinkan oleh majelis, sumpah atau janji dapat diucapkan oleh saksi “sesudah/atau setelah” kesaksiannya.
- b. Kesaksian yang bernilai sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 168 KUHAP, selain mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri, terdapat syarat lain untuk menjadi seorang saksi. Seorang saksi tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP: Disamping itu, apabila saksi karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, dalam hal yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam Pasal 171 KUHAP

Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Apabila keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti maka kesaksian tersebut harus diucapkan didepan persidangan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Apabila seseorang yang menolak untuk memberikan keterangan kesaksian di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, kepadanya dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Nilai daripada kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah apabila terdapat hubungan yang berkorelasi dengan kebenaran dan kesesuaian dengan fakta. Kebenaran kesaksian jelas harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

## **Pemeriksaan saksi di persidangan**

### **Pemeriksaan Saksi pada Tahap penyidikan**

Apabila penyidik mengetahui bahwa suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng telah terjadi baik diketahuinya melalui laporan yang dilakukan oleh korban Chandra Hermanto terhadap penyidik Kepolisian, maka dalam hal ini petugas kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi (yang dilaporkan).

Saksi-saksi yang diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng) yaitu:

1. Chandra Hermanto (Korban), umur 59 tahun, lahir di Malang tanggal 02 Nopember 1949, beralamat di Jalan Sudarno No.5 RT.03/RW.08 Kelurahan Ngalik Kota Batu.
  - a. Telah diperiksa oleh Penyidik Polwil Malang bernama GUNARSONO pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2009, pukul 17.15 Wib ;
  - b. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polwil Malang tidak terlampir Berita Acara Penyumpahan.
1. Fransiscus Gionata Mahdi, SE, umur 32 tahun lahir di Surabaya pada tanggal 08 Mei 1977 (Karyawan Bank CIMB Niaga tbk



Malang), beralamat di Jalan Kepundung No.39 RT.05/RW.05 Kelurahan Bareng Kota Malang.

- a. Telah diperiksa oleh Penyidik Polwil Malang bernama GUNARSONO pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2009, pukul 10.55 Wib ;
- b. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polwil Malang tidak terlampir Berita Acara Penyempahan.

2. Lisa Santoso (Adik terdakwa), umur 45 tahun, lahir di Malang tanggal 21 Nopember 1964, beralamat di Perum Pondok Blimbing Indah G.1/12 RT.07/RW.11 Kota Malang.

- a. Telah diperiksa oleh Penyidik Polwil Malang bernama GUNARSONO pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2009, pukul 10.55 Wib ;
- d. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polwil Malang tidak terlampir Berita Acara Penyempahan.

3. Prasetyo T.Wirohardjo (Pemilik Rumah), umur 41 tahun, lahir di Malang tanggal 28 Juni 1967, beralamat di Jalan Sulfat Agung 2/22 RT.01/RW.21 Kelurahan Purwantoro Kota Malang, Jalan Ciliwung Gg.II No.30 B Kelurahan Purwantoro Kota Malang.

- a. Telah diperiksa oleh Penyidik Polwil Malang bernama SUPRIYONO pada Hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009, pukul 09.30 Wib ;

- b. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polwil Malang tidak terlampir Berita Acara Penyumpahan.

5. Henru Purnomo, SH.,MH (Kuasa Hukum dari Prasetyo T.Wirohardjo), umur 49 tahun, lahir di Malang tanggal 16 Desember 1960, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono III.c No.53 Kota Malang.

- a. Telah diperiksa oleh Penyidik Polwil Malang bernama SUPRIYONO pada Hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009, pukul 09.30 Wib ;
- b. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polwil Malang tidak terlampir Berita Acara Penyumpahan.

Keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, sebab telah dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila dinyatakan di sidang pengadilan.

Selama ada pemanggilan dari pihak penyidik untuk proses kelancaran pemeriksaan di penyidikan para saksi (Fransiscus Gionata Mahdi (Karyawan Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Malang), Henru Purnomo, SH., MH (Kuasa Hukum dari Prasetyo), Prasetyo T. Wirohardjo (Pemilik rumah), Lisa Santoso (Adik terdakwa) wajib datang saat dipanggil oleh penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Surat panggilan yang sah artinya surat panggilan yang

ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Jikalau seorang atau saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu harus datang ketempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP). Tetapi jika saksi telah dipanggil secara sah tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka saksi tersebut dapat dipidana menurut Pasal 224 KUHP menyatakan barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

#### **Pemeriksaan Saksi pada Tahap Persidangan**

Antara penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) pada putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg harus mempunyai korelasi yang erat dimana berhasil atau tidaknya penuntutan disidang pengadilan Malang, hal itu tidak terlepas dari hasil penyidikan dari pihak Kepolisian, karena kalau hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak menyakinkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng, maka penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum juga tidak akan dilakukan. Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Saksi-saksi yang hadir dan bersumpah didepan majelis hakim untuk pembuktian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) yang dilakukan oleh terdakwa:

1. Chandra Hermanto (Korban)/ *A Charge*
2. Fransiscus Gionata Mahdi (Karyawan Bank CIMB Niaga tbk Malang)/ *A Charge*
3. Henru Purnomo, SH.MH (Kuasa Hukum dari Prasetyo T.Wirohardjo)/ *A Charge*
4. Lisa Santoso (Adik terdakwa)/ *A Charge*
5. Irma Sagita (Istri Terdakwa)/ *A de Charge*

Saksi Prasetyo T.Wirohardjo tidak dipanggil, tidak hadir dan tidak disumpah saat pembuktian dipersidangan, padahal saksi Prasetyo T.Wirohardjo ini dapat mengungkap kebenaran yang terjadi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena yang menjadi obyek permasalahan adalah jual beli rumah dari saksi Prasetyo T.Wirohardjo.

Pemeriksaan perkara di persidangan, hakim berhak mengubah cara pemeriksaan perkara itu, misalnya dalam penuntut umum mengajukan pemeriksaan secara singkat tapi hakim mengajukan harus diperiksa secara biasa. Hal ini mengakibatkan surat tuduhan atau surat dakwaan dalam bentuk tertulis dan hal ini juga mempunyai akibat hukum kepada batas hukuman yang

dijatuhkan oleh hakim. Kasus ini telah bisa disidangkan dalam arti telah lengkap semua bahan yang diperlukan, maka untuk pertama kalinya terdakwa dipanggil masuk kedalam ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan penuntut umum setelah sebelumnya identitas terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dibacakan oleh hakim yang bersangkutan. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi Fransiscus Gionata Mahdi (Karyawan Bank CIMB Niaga tbk Cabang Malang), Henru Purnomo, SH., MH (Kuasa Hukum dari Prasetyo), Lisa Santoso (Adik terdakwa) yang akan memberikan keterangan kesaksian dipersidangan, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah saksi Chandra Hermanto yang menjadi saksi korban/pelapor (Pasal 160 ayat (1) butir (b) KUHAP).

Agar supaya keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan saksi itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum mendengar

keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

**Implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sahnya sebuah putusan Hakim No. 245/ Pid.B/ 2016/ PN. Malang.**

Permasalahan yang timbul dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) pada putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg. Ini terjadi antara terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dengan Chandra Hermanto (korban) masih ada hubungan saudara dimana terdakwa (Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng) masih adik ipar korban (Chandra Hermanto).

Perkara ini sendiri merupakan perselisihan antara Apeng dengan kakak iparnya Chandra Hermanto. Chandra Hermanto melaporkan Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena dia pernah memberikan uang senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) kepada Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng untuk membeli rumah milik Prasetyo.T. Worohardjo. Namun, dalam perjalanan ternyata uang tersebut tidak dipakai untuk membeli rumah milik saksi Prasetyo.T. Worohardjo. Sehingga Chandra Hermanto memperkarakan ini ke jalur pidana. Atas masalah ini Timotius

Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng kemudian mendapatkan vonis hukuman tiga tahun<sup>15</sup>.

**Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang ditinjau dari Teori Keadilan.**

**Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang dalam aspek kesetaraan dan keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana**

Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg terhadap pelaku tindak pidana Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng terhadap korban tindak pidana Chandra Hermanto, harus memberikan porsi yang sama, maksudnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dan korban tindak pidana yang merasa dirugikan selalu mendapatkan ketegasan dari hakim tentang kerugian yang dialami dengan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap terdakwa.

Ada hal yang perlu di cermati terhadap putusan hakim yang kadang sering merugikan salah satu pihak, karena hal tersebut tidak terlepas dari porsi keberadaan dari hakim itu sendiri sebagai manusia, meskipun hakim adalah wakil Tuhan yang ada di dunia. *Officium Nobile* (jabatan mulia) yang melekat dalam diri seorang hakim, kadang tidak terlepas dari kealpaan dan kelupaan dari seorang hakim yang pada saat itu dia membawa status tersebut. Itu dikarenakan ada sifat-sifat yang masih kadang melekat dalam diri seorang manusianya. Manusia yang berintegritas akan memberikan perwujudan sebuah keadilan. Keadilan adalah kebijakan utama (*first virtue*).

---

<sup>15</sup><http://pemerintahan.radarmalang.id/ma-usut-dugaan-putusan-palsu-di-pn-kota-malang/> hari senin tanggal 22 Mei 2017



Dalam menjadi hakim sangat berat dan perlu seorang manusia yang betul-betul mempunyai intelegensitas, integritas dan moralitas yang sangat tinggi, karena posisi yang disandang sangat memberikan sebuah hasil yang sangat menentukan dari konsekuensi dan nantinya akan diterima dari seorang pelaku tindak pidana, seperti kasus perkara tindak pidana dalam putusan hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg, bahwa pelaku diputus bersalah dan harus menjalani hukuman 3 tahun di balik jeruji penjara. Konsekuensi yang diterima oleh pelaku adalah bahwa pelaku akan menjalani hidupnya terpisah dari keluarga dan hidup dalam balik jeruji besi, dimana pelaku tidak lagi bisa menafkahi keluarga yang selama ini dia topang dalam kehidupannya.

**Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang dalam aspek peraturan yang berlaku terhadap Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana**

Disini terlihat adanya ketidakadilan dalam sebuah aturan-aturan yang ada:

- a. Pasal 266 ayat 1 KUHP: Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- b. Pasal 160 (1) a KUHP: Saksi di panggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengarkan pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

- c. Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.  
Sumpah atau janji ini dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.  
Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.
- d. Pasal 185 (1) KUHAP: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- e. Pasal 185 (7) KUHAP: Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti.
- f. Pasal 197 (1) huruf d KUHAP:  
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, pasal 197 ayat 2: tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- g. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, secara garis besar ada 10 (sepuluh) poin implementasi atas prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim : a. Berperilaku adil, b. Berperilaku jujur, c. Berperilaku arif dan bijaksana, d. Bersikap mandiri, e. Berintegrasi tinggi, f. Bertanggung jawab, g. Menjunjung tinggi harga diri, h. Berdisiplin tinggi, i. Berperilaku rendah hati, dan j. **Bersikap profesional.**

- h. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim menyatakan bahwa hakim harus “berdisiplin tinggi”. Dalam penjelasan penerapan etika “berdisiplin tinggi” diuraikan di antaranya bahwa “hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan, pasal 1 angka 7 peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, Nomor 02/PB/P.KY/IX/2012 : Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran; bahwa sesuai dengan terminologi “pelapor” dalam pasal 1 angka 7 peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, Nomor 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, siapapun yang menyaksikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim berhak melaporkan kepada Komisi Yudisial.
- i. Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, dengan integritas yang melekat pada hakim, maka hakim dapat menentukan, melakukan penafsiran makna terhadap pasal-pasal dalam aturan perundang-undangan

sebagai *ius constitutum* Negara Republik Indonesia, karenanya dalam penegakan hukum dan keadilan.

j. Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana di atas maka nyatalah pelanggaran Kode Etik yang berkaitan dengan:

- 1) Sikap Profesional, bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas **“sikap profesional”** akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
- 2) Berprerilaku Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan **“Disiplin tinggi”** akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum

secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- 4) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan (*equality before the law*) dan ketidak-berpihakan.
- 5) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya<sup>16</sup>. Seperti yang terkandung makna dalam asas *Equality Before The Law* (kesederajatan di mata hukum). Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum.

Akan menjadi putusan yang semestinya dan ideal apabila saksi Prasetyo T. Wirohardjo tidak dimasukkan dalam daftar alat bukti putusan Hakim

---

<sup>16</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 125.

No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg. Memang saksi Prasetyo T. Wirohardjo dalam hal ini merupakan saksi yang bisa memberikan kesesuaian antara saksi-saksi lainnya, sebab obyek yang digunakan pelaku tindak pidana merupakan obyek milik saksi Prasetyo T. Wirohardjo pada waktu itu, yakni rumah SHM No.3180/Kelurahan Purwantoro atas nama istri saksi Prasetyo T. Wirohardjo (nyonya Fanny Soelistyowati) yang terletak di jalan Sulfat Agung Boulevard No.2 Kota Malang.

Bismar Siregar berpendapat bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau yang sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, juga kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung-jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggung-jawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung-jawabkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>17</sup>.

Menurut Ahmad Rifa'I, hakim dalam membuat pertimbangan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak-cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung-jawabkan pertimbangan putusannya<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 36.

<sup>18</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 94.

Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu perkara pidana seharusnya dicantumkan pada surat putusan yang dibuat agar bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak baik penuntut umum maupun terdakwa, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum<sup>19</sup>.

Akibat adanya kelalaian, kesalahan dan kekeliruan yang disebabkan oleh Hakim dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/201/PN.Mlg menyebabkan konsekuensi yang harus di terima oleh hakim tersebut. Yakni beberapa hakim yang menangani perkara dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg akhirnya di periksa oleh MA<sup>20</sup>, karena adanya keterangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo yang dicantumkan atau dituangkan dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg, sedangkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo selama pemeriksaan di persidangan tidak dihadirkan dan mengucap sumpah. Dari sini terlihat adanya kelalaian, kesalahan dan kekeliruan hakim dalam mencantumkan dan menuangkan keterangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/PN.Mlg.

Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput ataupun kurang diperhatikan hakim dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>19</sup>Leden Marpaung,2011, *Proses Penanganan Perkara (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 57

<sup>20</sup><https://pemerintahan.radarmalang.id/ma-usut-dugaan-putusan-palsu-di-pn-kota-malang/hari-senin-tanggal-22-Mei-2017>



Apabila diperinci lebih dalam, aspek-aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan oleh hakim dalam membuat keputusan pada praktik peradilan lazimnya dapat berupa<sup>21</sup>:

1. Kelalaian, kurang hati-hatian dan kekeliruan/kehilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain *judex facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP, *judex facti* mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan atau kualifikasi dari tindak pidana, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana dirasakan tidak adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sebagainya.
2. Kelalaian, kurang hati-hatian dan kekeliruan/kehilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Kekeliruan, kesalahan penerapan hukum dan kesalahan penafsiran unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (*ius*

---

<sup>21</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, Bandung: Alumni, hal.265.

*commune*) yang diatur dalam maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana khusus<sup>22</sup>.

### **Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang di tinjau dari Pembuktian Hakim di Persidangan**

Hakim dalam putusan No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggelar alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan alat bukti surat sudah memberikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, sampai dalam proses pembuktian saksi terjadi kelalaian dalam memasukkan data saksi atas nama Prastyo T. Wirohardjo pada waktu itu, sehingga nama saksi Prasetyo T. Wirohardjo terjadi kelalaian dalam memasukkan data saksi atas nama Prastyo T. Wirohardjo pada waktu itu muncul sebagai alat bukti dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg, padahal pada waktu itu saksi Prasetyo T. Wirohardjo tidak hadir di persidangan dan tidak pula dilakukan sumpah. Adanya cacat formil yang ada dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg tersebut, karena seharusnya saksi Prasetyo T. Wirohardjo tidak dimasukkan sebagai alat bukti saksi, karena selama pembuktian di persidangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo tidak hadir dan tidak mengucapkan sumpah.

Peranan hakim dalam putusan No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg sangat dibutuhkan berbagai pihak, baik korban dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri Malang disini memegang peranan yang sangat penting dalam hal penjatuhan perkara tindak

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 396-397

pidana penipuan dan penggelapan meskipun hakim dalam pemeriksaan di persidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan surat dakwaan yang dibuat oleh pihak Penuntut Umum, sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Meskipun berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan surat dakwaan yang dibuat oleh pihak penuntut umum, tetapi hakim tetap mengacu pada hasil pembuktian di persidangan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan berbagai pedoman BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Kepolisian dan surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum dijadikan sebuah penafsiran atau interpretasi hakim dalam memutus perkara di persidangan (*judex facti*).

**Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang ditinjau dari Pertimbangan Putusan.**

Dengan adanya keterangan saksi *A De Charge* dan keterangan terdakwa tersebut akan memberikan sebuah pertimbangan yang berbeda dengan adanya pernyataan masing-masing tersebut, karena hakim akan mencantumkan atau menuangkan dalam pertimbangan putusannya. Sebab dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*, *bukti surat yang diajukan terdakwa* dan keterangan terdakwa, hal ini yang menyebabkan hakim terlalu subyektif dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya, dimana seharusnya hakim obyektif dalam memberikan pertimbangan dengan mendengarkan para pihak dan menuangkan hasil

pertimbangan secara seimbang dalam putusan (*Audit et Atteram Partem*) terhadap seluruh pihak yang berperkara dalam persidangan baik pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng dan korban Chandra Hermanto sehingga dalam pertimbangan putusan hakim yang diambil oleh hakim tidak memihak dan berat sebelah khususnya terhadap terdakwa tindak pidana penipuan dan penggelapan (*Fair Rial* atau *Self Incrimination*) dengan mencantumkan atau menuangkan keterangan saksi *a de charge*, *bukti surat* dan keterangan terdakwa.

Menurut Nanda Agung Dewantara, pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi materi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi<sup>23</sup>.

Seorang Hakim pada dasarnya adalah seorang manusia biasa yang walaupun telah berusaha sebaik mungkin untuk bertitik tolak dari sikap-sikap seorang hakim yang baik, namun masih saja tidak luput dari kelalaian, kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses peradilan hingga terkadang berakibat pada putusan yang diambilnya pada suatu perkara.

Akibat adanya kelalaian, kesalahan dan kekeliruan yang disebabkan oleh Hakim dalam putusan No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg menyebabkan konsekuensi yang harus

---

<sup>23</sup>Nanda Agung Dewantara, 1997, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta:Aksara Persada Indonesia, hal. 50.

di terima oleh hakim tersebut. Yakni beberapa hakim yang menangani perkara dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg akhirnya di periksa oleh MA<sup>24</sup>, karena adanya keterangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo yang dicantumkan atau dituangkan dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg, sedangkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo selama pemeriksaan di persidangan tidak dihadirkan dan tidak mengucap sumpah. Dari sini terlihat adanya kelalaian, kesalahan dan kekeliruan hakim dalam mencantumkan dan menuangkan keterangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/PN.Mlg.

#### **Putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN. Malang ditinjau dari Proses Penemuan Hukum**

Memang secara hukum dan azas yang ada sisi kebebasan hakim dilindungi, sebagaimana dalam UU No.48 Tahun 2009 dan azas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” (Segala bentuk putusan yang sudah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar), sehingga berpegang dengan adanya aturan dan azas yang melindunginya maka keberadaan hakim seringkali disusupi oleh praktik mafia peradilan di negeri ini, anggapan bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara itu sudah didasarkan atas aturan dan azas yang sudah berlaku dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Prinsip yang didasari oleh hakim ini dirasakan sangat memberikan peluang-peluang bagi hakim maupun pihak luar yang menghancurkan makna “Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum”. Oleh sebab itu perlunya sisi kualitas dari

---

<sup>24</sup><https://pemerintahan.radarmalang.id/ma-usut-dugaan-putusan-palsu-di-pn-kota-malang/hari-senin-tanggal-22-mei-2017>

hakim itu sendiri baik dari “intelektual, integritas dan tak kalah pentingnya moralitas hakim”, karena setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal hukum karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Lembaga peradilan berperan penting karena satu-satunya institusi formal dalam mengelola permasalahan hukum dari setiap warga yang mengalami kesulitan dan menjadi andalan serta tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan. Penegakan hukum melalui peradilan menggunakan hukum formil atau hukum acara. Tujuan hukum formil adalah menegakkan hukum materiil. Untuk mencari kebenaran hukum materiil diperlukan suatu pembuktian menurut hukum formil. Ditinjau dari perspektif hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak. Pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam membuat putusan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni

segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta di persidangan<sup>25</sup>.

Apabila tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan sengaja mencantumkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo dalam pertimbangan putusan, sedangkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo sama sekali tidak hadir dan disumpah dalam persidangan, berarti ada permasalahan pidana yang dilakukan oleh hakim tersebut, yakni adanya keterangan palsu yang dimasukan oleh Hakim ke dalam putusan dalam perkara pidana No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg (akta) sehingga apabila terdakwa merasa dirugikan atas keterangan palsu yang dimasukan oleh hakim dalam putusan aquo maka terdakwa dapat melaporkan Hakim kepada Kepolisian dengan merujuk pada Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu: Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya itu benar, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkakan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Tindakan hakim ini dapat merusak reputasi dari institusi dan hakim tersebut, karena integritas dari institusi dan hakim tersebut sudah ternoda dengan adanya tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim yang merupakan tembok terakhir warga Negara yang meminta adanya sebuah keadilan.

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hal.1-2

## Kesimpulan

### **Kedudukan saksi dalam putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang di Pengadilan Negeri Malang**

Keberadaan para saksi yang ada dalam putusan Hakim No.254/Pid.B/2016/PN.MLG dapat dilihat bahwa adanya saksi Korban/Pelapor (Chandra Hermanto), saksi *A Charge* (Fransiscus Gionita Mahdi (Karyawan Bank CIMB Niaga tbk, Malang), Henru Purnomo, SH.,MH (kuasa hukum dari prasetyo), Lisa Santoso (Adik terdakwa), Prasetyo T.Wirohardjo (Pemilik Rumah) dan saksi *A De Charge* Irma Sigit (Istri terdakwa), bahwa keberadaan saksi-saksi ini yang akan memberikan penilaian pembuktian hakim selama dalam pemeriksaan persidangan, hakim akan menilai dimana kekuatan dan kelemahan dari saksi yang ada untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan pantas apabila terdakwa dirasa oleh hakim tersebut benar-benar melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan (378, 372 KUHP).

Dalam proses penilaian kekuatan kesaksian seluruh saksi yang dihadirkan dalam pembuktian di persidangan ini, akan memberikan seluruh penafsiran (interpretasi) hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya nanti.

Tetapi ada saksi *A Charge* yang tidak dihadirkan selama proses pembuktian di persidangan yaitu Prasetyo T.Wirohardjo sebagai pemilik rumah, yang mana saksi Prasetyo T.Wirohardjo ini akan mengungkapkan hal yang sebenarnya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng, karena bermula dari



permasalahan ini yang timbul tentang laporan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk membeli sebuah rumah milik Prasetyo T.Wirohardjo yang ada di Jalan Sulfat Agung Boulevard No.2 Malang.

Disini sebenarnya nilai kekuatan kesaksian yang dimiliki oleh saksi Prasetyo T.Wirohardjo akan memberikan keterangan dalam persidangan yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci, dan dari kesaksian Prasetyo T.Wirohardjo inilah hakim dapat menilai kebenaran perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng tersebut.

Tindakan hakim yang memasukkan keterangan saksi Prasetyo T.Wirohardjo dalam putusan yang seolah-olah saksi ini hadir dalam persidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah padahal tidak saksi Prasetyo T.Wirohardjo tidak pernah datang dalam persidangan maka hakim telah melanggar hukum acara pidana dimana saksi harus disumpah dalam persidangan sehingga putusan dalam perkara ini terdapat kekeliruan, kesalahan dan kelalaian hakim yang nyata dalam membuat putusannya, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum pasal 197 ayat (2) KUHAP.

**Implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sah nya sebuah putusan dalam perkara pidana No.245/ Pid.B/2016/PN.Mlg.**

Implikasi dengan tidak hadirnya Prasetyo T.Wirohardjo dalam persidangan di putusan Hakim No.245/ Pid.B/2016/PN.Mlg akan memberikan kondisi dimana putusan hakim tersebut jadi terlihat abstrak, karena keterangan saksi Prasetyo

T.Wihardjo -lah yang sebenarnya akan mengungkapkan kejelasan dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng.

Dengan hasil pertimbangan yang sangat memihak dan terlalu berat sebelah terdakwa korban, dimana selain saksi Prasetyo T.Wihardjo tidak dihadirkan, juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak mengacu adanya sisi lain, yakni kesaksian *A De Charge* Irma Sigit (Istri terdakwa), bukti surat yang diajukan terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga Hakim sangat subyektif dalam mengadili perkara ini karena hakim hanya memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan korban/pelapor dalam hal ini.

Sifat putusan yang dilakukan oleh hakim yang subyektif tersebut juga dilakukan saat memberikan putusan, yang mana putusan tersebut ada saksi Prasetyo T.Wihardjo yang dimasukkan dalam daftar nama saksi selama pemeriksaan dipersidangan dan dianggap juga di sumpah, disini adanya kekeliruan, kesalahan dan kelalaian hakim dalam membuat putusannya, karena hal itu akan menjadi cacat formil putusan tersebut dan seharusnya dianggap batal demi hukum, dan apabila dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen/akta/putusan Hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Mlg (pasal 266 KUHP) yang dilakukan oleh hakim, sehingga apabila terdakwa merasa dirugikan akibat keterangan palsu yang dimasukkan oleh hakim dalam putusan aquo maka terdakwa dapat melaporkan Hakim kepada Kepolisian dengan menggunakan pasal 266 KUHP.

## Saran

Kedudukan saksi dalam putusan hakim No.245/Pid.B/2016/PN.Malang

Dengan adanya kedudukan saksi Prasetyo T. Wirohardjo yang begitu penting dalam permasalahan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378, 372 KUHP) yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng, seharusnya hakim jeli dan cermat dalam mengadili perkara tersebut, sehingga bagaimanapun keadaan dan situasinya saksi Prasetyo T.Wiroardjo harus di periksa di dalam persidangan, karena hakim harus memahami keadaan fakta (*judex facti*) perbuatan tindak pidana penipuan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng tersebut.

Sebab nilai kesaksian yang diberikan oleh saksi Prasetyo T. Wirohardjo akan mengungkap perbuatan terdakwa yang sebenarnya apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana ataupun perbuatan perdata, jadi tidak hanya melihat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian dan surat dakwaan dari Penuntut umum semata. Hakim harus mendengar sendiri keterangan saksi Prasetyo T. Wirohardjo dan dilakukan dibawah sumpah, agar terpenuhi segala fakta dan realita tindak pidana yang dilakukan terdakwa Timotius Tonny Hendrawan alias Toni Hendrawan Tanjung alias Apeng.

Implikasi hukum bagi Hakim terhadap putusan tanpa adanya saksi yang memenuhi standar sahny sebuah putusan dalam perkara pidana No. 245/ Pid.B/ 2016/PN.Mlg.

Putusan hakim adalah sebuah mahkota, dimana pada putusan tersebut akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap korban maupun terdakwa dan putusan hakim tersebut disamping akan mencerminkan keberadaan dari hakim yang melakukan persidangan hingga memberikan putusannya tapi juga akan memberikan efek dampak dari putusan tersebut terhadap institusi pengadilan yang dinaungi oleh hakim tersebut.

Keberadaan hakim yang mencantumkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo seolah hadir di persidangan dan di anggap melakukan sumpah dalam persidangan juga akan memberikan konsekuensi terhadap hasil putusan yang dilakukan. Seharusnya hakim jujur dan bijaksana dalam memberikan sebuah putusannya, kalau dirasa memang tidak ada saksi Prasetyo T. Wirohardjo hadir dalam persidangan maka ya seharusnya tidak dicantumkan saksi Prasetyo T. Wirohardjo dalam putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya* Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung

Nanda Agung Dewantara, 1997, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta:Aksara Persada Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Ronny Hamitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*,  
<http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>,  
diakses pada tanggal 11 Juni 2017

PERATAURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<https://pemerintahan.radarmalang.id/ma-usut-dugaan-putusan-palsu-di-pn-kota-malang/> hari senin tanggal 22 Mei 2017